



Penulis : Nelly L. Rachman  
Editor : Fathan Nur Hamidi

# Cerdas Menyeleksi, Peduli Mengawasi: Peran Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan

"Kami mendorong para *influencer/content creator* untuk melihat secara holistik berbagai aspek sebelum membuat ulasan, termasuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari ulasan tersebut. Selain itu, BPOM mengajak media dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut menyebarkan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat terkait keamanan, manfaat, dan mutu kosmetik, sekaligus mendukung daya saing kosmetik dalam negeri," demikian ungkap Kepala BPOM Taruna Ikrar, 17 Januari 2025.

Indonesia, negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki bentang wilayah yang sangat luas. Dari ujung barat di Pulau Bengkulu hingga ujung timur di Merauke, serta dari utara di Pulau Rondo sampai selatan di Pulau Rote, negara ini memiliki luas wilayah sekitar 1.904.569 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 17.504 pulau. Keberagaman geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, tidak hanya dari sisi alam, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan lebih dari 278 juta jiwa yang tersebar di berbagai daerah.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam hal pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Luas wilayah, kondisi geografis yang beragam, berbatasan dengan setidaknya 10 negara (batas darat dan batas laut), banyaknya pintu masuk baik melalui laut maupun darat, berperan sebagai jalur perdagangan internasional, serta disparitas infrastruktur membuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia tak bisa hanya bertumpu pada satu institusi.

BPOM memikul tanggung jawab besar untuk memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat Indonesia aman, berkhasiat, dan bermutu. Namun dengan 5.302 pegawai yang tersebar di kantor pusat dan 76 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, tentu tidak mudah bagi BPOM untuk menjangkau semua sudut wilayah.

Dalam kesehariannya, pegawai BPOM berbagi tugas. Tugas tersebut mencakup segala hal, mulai dari penyusunan kebijakan, norma, dan standar di bidang obat dan makanan, hingga pengawasan langsung di lapangan, termasuk memeriksa fasilitas produksi dan distribusi, melakukan sampling dan pengujian produk, memantau label dan iklan produk, serta edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Tugas ini dilakukan terhadap 5 komoditas pengawasan BPOM, yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Sebagai catatan, sampai dengan 2025, setidaknya terdapat 740 ribu produk terdaftar di BPOM.



## Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BPOM menyadari bahwa pengawasan tak bisa berjalan efektif tanpa dukungan publik yang peduli dan aktif. Di balik keterbatasan sumber daya dan kompleksitas pengawasan, masyarakat justru memegang peranan penting sebagai garda terdepan. Merekalah yang sehari-hari bersentuhan langsung

dengan produk—baik sebagai konsumen, pelaku usaha, hingga pedagang di pasar tradisional maupun daring.

Dalam pengawasan obat dan makanan, masyarakat bukan hanya sebagai konsumen yang pasif, tetapi sebagai mitra strategis yang memiliki peran besar. Dengan literasi yang tepat, masyarakat bisa menjadi 'mata dan telinga' yang membantu BPOM dalam mendeteksi produk yang mencurigakan. Melalui cara sederhana seperti memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa, masyarakat bisa mencegah penyebaran produk ilegal dan/atau palsu yang membahayakan kesehatan.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat tak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga penyebaran informasi yang benar kepada komunitas sekitar, memastikan tidak ada lagi produk yang membahayakan kesehatan. BPOM pun terus mendorong partisipasi aktif ini melalui berbagai pendekatan. Kampanye Cek KLIK misalnya, telah menjadi gerakan nasional yang mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk. Cara ini terbukti sederhana tapi efektif dalam mencegah masyarakat terpapar produk ilegal, palsu, atau tidak layak konsumsi.

## Regulasi tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Peran Serta Masyarakat

BPOM menyadari bahwa pengawasan yang efektif memerlukan komitmen semua pihak yang diejawantahkan